



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADE MIRZA**
2. Jabatan : **KETUA PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA**
3. NHK : **76813**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.032.898.150**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 92.700.000
2. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 663.120.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/105 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 275.355.000
4. Tanah Seluas 241 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 1.723.150

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 15.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC / R2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA LIPAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 14.075.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 554.707.483**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.617.180.633

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.617.180.633

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.